



>>> **INDEKS** <<<
KEMISKINAN
MASYARAKAT
KOTA TANGERANG

2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dapat menyelesaikan Laporan Indeks Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2020.

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh semua Kota/Kab se Indonesia tak terkecuali Kota Tangerang. Untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Kami berharap laporan ringkas ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang. Kepada pihak Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dan semua pihak yang telah mendukung terbitnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Tangerang, Oktober 2020

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tangerang**

Mulyani, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19670804198730

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK/DAFTAR GAMBAR	vi
I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan	2
1.3 Sumber Data	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. Metodologi	
2.1 Konsep Kemiskinan	5
2.2 Metodologi Penghitungan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin.....	7
2.3 Persentase Penduduk Miskin,Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	11
2.4 Gini Ratio dan Ketimpangan Pendapatan.....	13
III. Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan	
3.1 Garis Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Miskin.....	14
3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.....	23
3.3 Kedalaman(P1) dan Keparahan(P2) Kemiskinan	26

3.4	Gambaran Umum Perekonomian dan Distribusi Pendapatan.....	28
IV	Pemanfaatan Data Kemiskinan Mikro di Kota Tangerang	
4.1	Membandingkan Tujuan Dan Keterkaita Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif.....	33
4.2	Pemanfaatan Data Pendidikan Untuk Pengentasan Kemiskinan.....	37
V	Penutup	
5.1	Kesimpulan.....	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Banten dan inflasi Kota Tangerang Tahun 2014-2019.....	14
3.2 Komoditi Penyumbang Garis Kemiskinan (GK) Makanan Provinsi Banten 2019 (dalam Persen)	17
3.3 Komoditi Penyumbang Garis Kemiskinan (GK) Non Makanan Provinsi Banten 2019 (dalam Persen)	18
3.4 Persentase Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin se Provinsi Banten Menurut Kab /Kota Tahun 2019	19
3.5 Pola Konsumsi Penduduk Miskin dan Rata-rata Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Konsumsi Makanan Tahun 2017-2019 (dalam Persen).....	20
3.6 Rata- rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah) Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011 – 2019.....	22
3.7 Rata- rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah) Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011 – 2019.....	24
3.8 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kab Kota se Prov Banten Tahun 2017 – 2019.....	27
3.9 Gini Ratio Kab/Kota se Provinsi Banten Tahun 2017 s.d 2019.....	30
4.1.1 Perbandingan Kemiskinan Mikro (Relatif) dan Kemiskinan Makro (Absolut).....	35
4.2.1 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan.....	38
4.2.2 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Ciledug tahun 2019.....	39

4.2.3 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Larangan Tahun 2019	40
4.2.4 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Karang Tengah Tahun 2019	41
4.2.5 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Cipondoh Tahun 2019	42
4.2.6 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Pinang Tahun 2019	43
4.2.7 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tangerang Tahun 2019	44
4.2.8 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Menurut Kelurahan di Kecamatan Karawaci Tahun 2019	45
4.2.9 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiuwung Tahun 2019	46
4.2.10 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Menurut Kelurahan di Kecamatan Cibodas 2019	47
4.2.11 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Periuk Tahun 2019	47
4.2.12 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Batuceper Tahun 2019	48
4.2.13 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Neglasari Tahun 2019	49
4.2.14 Penduduk RTS Umur 7 sd 18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kelurahan di Kecamatan Benda Tahun 2019	50
4.2.15 Penduduk RTS Umur 7 s/d 12, 13 s/d 15 dan 16 s/d 18 Tahun Yang Belum Pernah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2019.....	51

DAFTAR GRAFIK

Halaman

3.1	Persentase dan jumlah Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2012 -2019.....	25
4.1	Jumlah Penduduk RTS umur 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun yang Belum Pernah Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2019.....	52

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap negara yang melakukan pembangunan akan menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu orientasi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan, cita-cita mulia Milenium Development Goals (MDG's) yang berakhir tahun 2015 kemudian dilanjutkan Sustainable Development goals (SDG's) yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia, dengan target salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Didalam dokumen SDG's memuat tujuan antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan .

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk Indonesia. Masalah mendasar (kemiskinan) tidak hanya menyangkut jumlah/persentase atau identifikasi penduduk miskin yang layak mendapat bantuan saja, juga menyangkut masalah definisi kemiskinan itu sendiri. Perbedaan definisi ini akan mengakibatkan perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan dan perbedaan dalam persepsi atas hasil dan implementasinya.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa faktor antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan *in efficiency economic*, terdapat alokasi asset yang tidak efisien dan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar dan kemudian menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar.

Gambaran kemiskinan di Kota Tangerang dalam laporan ini ditampilkan dalam beberapa indikator, antara lain banyaknya jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan, pola konsumsi penduduk miskin, tingkat pendidikan dan alasan penduduk usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan serta gambaran masalah pekerjaan penduduk miskin baik sektor formal maupun dan informal serta lapangan pekerjaan yang banyak ditekuni. Indikator ketidakmerataan pendapatan (*Gini Ratio*) juga akan ditampilkan pada publikasi ini.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari publikasi ini adalah untuk menyediakan informasi dan memberikan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan fenomena kemiskinan di Kota Tangerang antara lain pendidikan dan standar hidup layak. Untuk para pembuat kebijakan di daerah, kemiskinan jika dilihat dari sudut pandang tersebut seringkali lebih relevan dibandingkan dengan kemiskinan dari sudut pandang

pendapatan, sehingga memberikan perhatian lebih fokus pada penyebab kemiskinan dan terkait secara langsung dengan strategi pemberdayaan dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Beberapa informasi yang disajikan dalam hal ini adalah sbb :

- Mengetahui perkembangan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin sebagai basis data indikator kemiskinan absolut.
- Mengestimasi indikator kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan keparahan kemiskinan (*Poverty Serevity Index*).
- Mengetahui atau mengidentifikasi masalah pekerjaan penduduk miskin serta latar belakang pendidikannya dan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan pendidikan.
- Mengestimasi indikator pemerataan pendapatan, yaitu *Gini Coefficient* (Gini Ratio) dan *Relative Inequality Indicators*.

1.3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam analisis Kemiskinan ini adalah dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Konsumsi dan KOR Tahun 2019 dan Susenas Modul Konsumsi tahun sebelumnya.

Selain data Susenas, data hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) memberikan informasi mengenai jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi secara sangat rinci sehingga dapat diketahui untuk komoditi pakaian misalnya, item pakaian seperti apa yang menjadi kebutuhan pokok (apakah termasuk pakaian dalam anak-anak, topi dan sebagainya). Dengan demikian SPKKD memberikan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi yang dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Dengan proporsi tersebut, selanjutnya dari data Susenas dapat diperkirakan besarnya nilai kebutuhan pokok.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi Kemiskinan Kota Tangerang Tahun 2020 ini disusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab 2. Metodologi

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep, definisi, data dan formula dari indikator yang disusun dalam publikasi ini.

Bab 3. Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan

Bab ini berisi gambaran kemiskinan berupa jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan , gambaran umum tentang pendidikan dan pekerjaan penduduk miskin serta gambaran umum tentang ketidakmerataan pendapatan (Indeks Gini Ratio).

Bab 4. Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan dari laporan ini.

BAB II METODOLOGI

2.1. Konsep Kemiskinan

Menurut World Bank, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain (BPS, 2015). Sedangkan konsep yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) .

Berdasarkan cara pendekatannya, ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai “inability of the individual to meet basic needs” (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah “the failure to have certain minimum capabilities”. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu melebihi kemampuan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin. Perhitungan penduduk miskin di Indonesia pada dasarnya mengikuti konsep di atas.

Menurut definisinya, terdapat empat definisi kemiskinan yang digunakan saat ini, yaitu :

1. **Kemiskinan absolut** : kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Dapat dikatakan pula kemiskinan absolut adalah orang atau rumah tangga yang berada atau hidup di bawah standar minimal kehidupan. Standar ini dikenal dengan sebutan Garis Kemiskinan (GK). Dalam hal ini Garis Kemiskinan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Sehingga orang atau rumah tangga yang berada di bawah GK masuk dalam kelompok miskin. Konsep atau definisi ini bersifat mutlak tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, budaya, kondisi ataupun status sosialnya.
2. **Kemiskinan relatif** : kemiskinan adalah kondisi seseorang atau rumah tangga yang masih jauh lebih rendah kondisinya dibandingkan keadaan masyarakat sekitar. Seseorang atau rumah tangga berada dalam keadaan miskin meskipun sesungguhnya sudah berada di atas standar minimal (GK). Dalam hal ini Garis Kemiskinan sudah tidak menjadi pembatas lagi, karena kebutuhan minimal hidup orang atau rumah tangga ini sudah tidak hanya pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan saja, tetapi sudah masuk unsur gaya hidup, diantaranya unsur kualitas makanan, hiburan, komunikasi, dsb. Konsep atau definisi ini mengandung dimensi ketimpangan di dalamnya.
3. **Kemiskinan subyektif** : kemiskinan adalah kondisi atau status sosial seseorang atau rumah tangga yang memenuhi kriteria-kriteria miskin tertentu yang sudah ditetapkan. Kriteria ini dapat berupa kriteria yang obyektif melalui kajian ataupun tidak, seperti yang telah umum digunakan oleh masyarakat kita, misalnya janda, jompo, anak yatim, pengangguran, orang cacat, guru ngaji, dsb. Sehingga orang atau rumah tangga yang di dalamnya terdapat orang yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, masuk ke dalam kelompok miskin.

4. **Budaya kemiskinan** : kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk dapat secara mandiri memperbaiki kondisi kehidupannya. Sehingga orang atau rumah tangga ini sulit untuk dapat lepas dari lingkaran kemiskinan-pemiskinan (budaya kemiskinan). Konsep atau definisi ini mengandung dimensi yang lebih luas karena tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial budaya. Karena kemiskinan kultural dapat disebabkan oleh faktor alami maupun tidak. Kultur/budaya atau pola pikir seseorang atau masyarakat merupakan faktor alami dari budaya kemiskinan. Sedangkan kesalahan strategi atau kebijakan pembangunan yang menyebabkan tertutupnya atau bahkan matinya kesempatan seseorang untuk dapat memperbaiki kondisi hidupnya merupakan faktor bukan alami budaya kemiskinan.

Di dalam publikasi ini hanya menampilkan data atau indikator yang berpijak pada tiga konsep pertama (kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif) saja. Sedangkan budaya kemiskinan tidak disajikan, karena sulitnya menemukan indikator yang tepat dan berkesinambungan untuk dapat menggambarkan kondisi tersebut.

2.2. Metodologi Penghitungan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin

Berbeda dengan penentuan garis kemiskinan (GK) yang digunakan oleh Bank Dunia (pendapatan per kapita per hari US\$ 1,25 untuk kategori negara low income atau US\$ 2 untuk negara dengan kategori lower middle income), perkembangan tingkat kemiskinan dengan menggunakan konsep absolut yang digunakan oleh BPS perlu mendapatkan perhatian secara seksama, karena dua alasan.

Pertama, standar kemiskinan (GK) yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan bersifat dinamis, untuk menyesuaikan dengan perkembangan pola konsumsi penduduk kelas bawah, khususnya untuk standar kecukupan non makanan (perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan). Sedangkan untuk standar kecukupan

makanan sampai saat ini masih dianggap ideal yaitu setara dengan 2100 kalori per kapita per hari (rekomendasi Widyakarya Pangan dan Gizi 1978).

Kedua, standar kemiskinan sangat sensitif terhadap gejolak harga-harga (inflasi) kebutuhan pokok baik makanan maupun non makanan. Ketika harga-harga naik, GK juga meningkat sesuai dengan kenaikan nilai yang dibayar penduduk kelas bawah untuk memenuhi standar minimal kebutuhan dasarnya (makanan, perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan).

Garis kemiskinan(GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan(GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan(GKM) Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan(GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Formula garis kemiskinan dapat dinyatakan sbb:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana:

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan.

Garis Kemiskinan (GK) dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas GKS. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang diinflasi dengan inflasi umum (IHK). GK dibagi ke dalam dua bagian yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan GKM berasal dari data Susenas Panel dan Susenas Modul Konsumsi data yang rinci mengenai pengeluaran konsumsi baik dalam bentuk kuantitas maupun nilai terutama untuk 52

komoditi dasar makanan, sehingga nilai pengeluaran makanan setara 2100 kalori dapat diestimasi secara tepat. Tahapan penghitungannya adalah sebagai berikut:

- Tentukan penduduk referensi, yaitu penduduk yang hidup sedikit di atas GK. Setelah itu dihitung nilai pengeluaran (V) dan kalori (K) untuk seluruh pengeluaran 52 komoditi makanan dari penduduk referensi. Kemudian dihitung nilai/harga rata-rata per kalori (H) dengan cara membagi nilai pengeluaran (V) dengan kalori (K) dan terakhir di hitung GK untuk makanan, yaitu nilai pengeluaran setara 2100 kalori ($H \cdot 2100$).
- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :
 - Nilai kebutuhan minimum untuk komoditi non makanan meliputi perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan dihitung dengan mengalikan suatu rasio komoditi/sub kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub kelompok (r)

dengan nilai pengeluaran sub kelompok (V) tersebut. Rasio (r) ini diperoleh dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) dan terakhir dilakukan pada tahun 2004. GK non makanan merupakan nilai total dari hasil perkalian ($r \cdot V$) tersebut.

GK merupakan penjumlahan dari GK makanan dan GK non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin diperoleh dengan cara memotong/membatasi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang kurang dari GK setelah data mentah (*raw data*) diurutkan terlebih dahulu dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang terkecil hingga terbesar.

2.3. Persentase Penduduk Miskin, Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Setelah jumlah penduduk miskin diperoleh, maka selanjutnya dihitung persentase penduduk miskin berdasarkan penduduk Susenas Kor sebagai nilai persentil untuk menghitung GK. Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Ukuran tersebut terdiri dari 3 indikator yaitu :

1. **Head Count Index/HCI (P_0)** yang menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah GK. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.
2. **Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*/ P_1)** yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin (GK). Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. **Keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*/ P_2)** yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin.

Rumusan tersebut adalah sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{GK - y_i}{GK} \right)^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0, 1, 2$. Jika

$\alpha = 0$ diperoleh *Head Count Index (Po)*,

$\alpha = 1$ diperoleh *Poverty Gap Index (P1)*,

$\alpha = 2$ diperoleh *Poverty Severity Index (P2)*.

GK = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < Gk$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

N = jumlah penduduk.

2.4. Gini Ratio dan Ketimpangan Pendapatan

Kriteria Bank Dunia membagi distribusi pendapatan menjadi tiga kelompok, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah (miskin), 40 persen penduduk berpendapatan menengah (kaya) dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi (terkaya).

Kriteria *relative inequality* berdasarkan kriteria Montek S. Ahluwalia atau Bank Dunia adalah sebagai berikut :

- Ketimpangan dianggap parah apabila 40 persen penduduk berpenghasilan rendah menikmati kurang dari 12 persen Produk domestik.
- Ketidakmerataan dianggap moderat apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati 12-17 persen Produk domestik.
- dan apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17 persen produk domestik maka ketimpangan atau kesenjangan dinyatakan lunak.

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan *Gini Ratio* dimana nilai *indeks Gini* ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai *indeks gini* nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. *Gini Ratio* menurut H. T. Oshima diartikan sebagai berikut, ketimpangan rendah (*low*) bila GR kurang dari 0,3; ketimpangan sedang (*moderate*) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4 dan tinggi (*high*) bila GR lebih dari 0,4. Sedangkan menurut Michael P. Todaro distribusi pendapatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2 sampai dengan 0,35; relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan kurang dari 0,5 dan sangat timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7.

BAB III

KEMISKINAN DAN IDIKATOR KEMISKINAN

3.1. Garis Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli makanan yang mengandung 2100 kkal perhari dan keperluan mendasar bukan makanan, dalam satu bulan. Penduduk dengan pengeluaran perkapita sebulan dibawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin, secara fisik sering ditandai dengan menderita kekurangan gizi dan tingkat kesehatan yang buruk dan berpendidikan rendah. Ciri orang miskin lainnya adalah biasanya bekerja dengan memperoleh penghasilan yang minim, bekerja di sektor informal maupun buruh serabutan, dengan penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok satu hari saja.

Tabel 3.1.

Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Propinsi Banten dan Perkembangan inflasi Kota Tangerang Tahun 2014 - 2019

No	Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab Pandeglang	237.111	247.073	267.752	285.822	310.859	326.517
2	Kab Lebak	219.177	228.146	246.389	261.88	283.901	298.201
3	Kab Tangerang	351.789	372.431	405.902	423.486	451.325	476.636
4	Kab Serang	223.19	232.856	256.66	269.652	294.829	309.036
5	Kota Tangerang	421.554	455.228	496.349	508.551	556.782	584.318
6	Kota Cilegon	306.253	323.935	347.949	373.147	428.867	459.469
7	Kota Serang	242.977	255.614	281.926	296.819	350.237	379.641

8	Kota Tangerang Selatan	401.696	433.967	472.968	494.784	549.150	593.781
	Provinsi Banten	315.819	356.436	367.949	386.753	431.069	462.726
	Perkembangan Inflasi Kota Tangerang (Persen)	10,03	4,28	2,65	3,50	3,46	3,31

Tabel 3.1 memperlihatkan garis kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Dimana pada tahun 2019 garis kemiskinan (GK) Kota Tangerang sebesar Rp 584.318 sedangkan Banten tercatat Rp 462.726. Memaknai garis kemiskinan sebesar Rp 584.318 perbulan yakni apabila suatu rumah tangga dengan anggota rumah tangga 2 orang anak, ayah, ibu dan mertua yang tinggal di rumah tersebut pengeluaran rumah tangga setiap bulannya kurang atau dibawah 5x Rp 584.318 = Rp 2.921.590 maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin, berbeda apabila dirumah tangga tersebut hanya terdiri dari 1 orang anak dan 1 orang ibu akan dikatakan miskin apabila pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp 1.168.636. Dengan kata lain batas pengeluaran rumah tangga miskin akan bervariasi tergantung pada jumlah anggota rumah tangganya.

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa garis kemiskinan (GK) Kota Tangerang tahun 2019 tidak lagi yang tertinggi seperti pada tahun tahun sebelumnya. GK Kota Tangerang pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 584.318 berada dibawah GK Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 593.781. Hal yang mempengaruhi tingginya GK yakni tergantung dari harga paket komoditi 52 jenis komoditi bahan makanan untuk mencapai kalori 2100 kkal, dan 51 jenis komoditi non makanan untuk memenuhi kebutuhan non pangan yang sangat mendasar untuk wilayah perkotaan, sedangkan pedesaan 47 jenis komoditi. Pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah juga sangat berpengaruh menentukan tingginya GK. Masyarakat yang biasa mengkonsumsi makanan kalori rendah tetapi harganya tinggi seperti rokok akan berpengaruh pada

tingginya GK, ada juga pola konsumsi masyarakat yang memilih makanan tertentu seperti daging harga perkalorinya tentu saja akan lebih tinggi dibandingkan harga perkalori untuk karbohidrat.

Garis Kemiskinan (GK) Kota Tangerang tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen dari tahun sebelumnya Rp 421.554 menjadi Rp 455.228. Pada tahun 2016 GK Kota Tangerang mengalami kenaikan sebesar 9,01 persen dari tahun sebelumnya Rp 455.228 menjadi Rp 496.349. Pada tahun 2017 GK Kota Tangerang mengalami kenaikan sebesar 2,64 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 508.551. Pada tahun 2018 GK Kota Tangerang mengalami kenaikan sebesar 9,48 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 556.782. Pada Tahun 2019 GK Kota Tangerang mengalami kenaikan sebesar 4,94 persen dari tahun 2018 menjadi Rp 584.318. Salah satu cara menekan laju kenaikan GK antara lain dengan menekan kenaikan harga (inflasi) dan juga mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi rokok dimana konsumsi rokok pada tahun 2019 menyumbang 15,62 persen dari Garis Kemiskinan meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 13,02 persen, sepertinya kenaikan harga rokok tidak membuat penduduk miskin berhenti merokok, mereka tidak mengurangi konsumsi rokok walaupun harganya naik, sementara kalori yang dihasilkan rokok adalah 0 kkal. Selain karena konsumsi rokok yang meningkat pilihan komoditas dengan nilai rupiah perkalori tinggi juga menjadi konsumsi penduduk miskin di Kota Tangerang, dari sisi inflasi Kota Tangerang relatif terkendali.

Garis Kemiskinan (GK) tertinggi ke 2 adalah Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar Rp 401.696 pada tahun 2014 dan naik menjadi Rp 433.967 pada tahun 2015 atau naik sebesar 8,03 persen, pada tahun 2016 naik menjadi Rp 472.968 atau naik sebesar 8,25 persen dari tahun sebelumnya, di tahun 2017 menjadi Rp 494.784 atau mengalami kenaikan sebesar 4,61 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 10,99 persen menjadi Rp 549.150. Pada tahun 2019 GK Kota

Tangerang Selatan menjadi yang tertinggi se Provinsi Banten yakni Rp 593.781 atau naik sekitar 8,13 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 GK Banten sebesar Rp 462.726, GK Tangerang Raya berada diatas GK Banten sedangkan GK 5 Kabupaten/Kota lainnya berada dibawah Provinsi Banten antara lain Lebak dengan GK terendah yaitu sebesar Rp 298.201, terendah berikutnya adalah Kabupaten Serang dengan GK sebesar Rp 309.036 berikutnya adalah Kabupaten Pandeglang dengan GK sebesar Rp 326.517 selanjutnya Kota Serang dan Kota Cilegon. Rendahnya Garis Kemiskinan Kab Lebak, Kab Serang, dan Kabupaten Pandeglang bisa dimaklumi karena sebagian besar wilayah itu adalah wilayah pedesaan dengan pola konsumsi yang utama adalah beras sebesar 24,61 persen dimana beras adalah makanan dengan kalori yang cukup tinggi dan harga perkalorinya cukup rendah .

Tabel 3.2. menunjukkan persentase terbesar komoditi penyumbang GK di Propinsi Banten pada Maret 2019 dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan. Dari gambar terlihat bahwa GK makanan penyumbang dominan adalah beras. Beras merupakan komoditi penyumbang terbesar GK yang dikonsumsi oleh penduduk miskin baik di pedesaan maupun perkotaan. Komoditi berikutnya adalah rokok, telur ayam ras, daging ayam ras, roti manis khusus untuk pedesaan, dan mie instan khusus untuk perkotaan.

Tabel 3.2.

Komoditi Penyumbang Garis Kemiskinan (GK) Makanan Provinsi Banten 2019 (dalam persen)
Maret 2019 (persen)

Perkotaan (%)	Komoditi		Perdesaan (%)
18,29	Beras		24,61
15,62	Rokok Kretek Filter		15,76
4,03	Telur Ayam Ras		2,93
3,37	Daging Ayam Ras	Roti	2,42
2,60	Mie Instan	Daging Ayam Ras	2,37

Sedangkan garis kemiskinan non makanan komoditi penyumbang utamanya adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan perlengkapan mandi seperti terlihat di Tabel 3.3 perbedaan yang sangat signifikan antara pedesaan dan perkotaan adalah konsumsi perumahan, bensin dan listrik.

Tabel 3.3.

Komoditi Penyumbang Garis Kemiskinan (GK) Non Makanan Provinsi Banten 2019 (dalam persen)

Maret 2019 (persen)

Perkotaan (%)	Komoditi		Perdesaan (%)
18,29	Perumahan		24,61
15,62	Bensin		15,76
4,03	Listrik		2,93
3,37	Pendidikan	Perlengkapan Mandi	2,42
2,60	Perlengkapan Mandi	Daging Ayam Ras	2,37

Selanjutnya ciri khusus pola konsumsi penduduk miskin pada umumnya adalah persentase konsumsi makanan selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase konsumsi non makanan. Tabel 3.4 menunjukkan persentase sebesar 44,50 persen pengeluaran penduduk miskin Kota Tangerang dihabiskan untuk konsumsi makanan, sisanya 55,50 persen dibelanjakan untuk non makanan. Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain penduduk miskin Kota Tangerang terlihat persentase untuk konsumsi makanan paling kecil dibawah Kota Tangsel dan jauh dibawah rata-rata penduduk miskin Propinsi Banten sebesar 67,75persen, ini menandakan penduduk miskin Kota Tangerang sudah lebih sejahtera dibandingkan daerah lain di Banten. Makin tinggi pendapatan seseorang atau makin sejahtera seseorang proporsi pengeluaran untuk makanan akan semakin kecil.

Tabel 3.4.

Persentase Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin se Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita Penduduk Miskin	
		Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pangeglang	60,11	39,89
2	Lebak	61,57	38,43
3	Tangerang	51,88	48,12
4	Serang	56,81	43,19
5	Kota Tangerang	44,50	55,50
6	Kota Cilegon	50,14	49,86
7	Kota Serang	51,66	48,34
8	Kota Tangerang Selatan	40,04	59,96

Selanjutnya pola konsumsi penduduk miskin Kota Tangerang dari data Susenas Maret 2019 sebagai pembandingan ditampilkan juga pola konsumsi penduduk Kota Tangerang pada umumnya. Pola konsumsi makanan penduduk miskin Kota Tangerang tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya tidak berubah, paling besar dihabiskan untuk membeli makanan jadi bisa dilihat di Tabel 3.5, tabel yang diolah dari Susenas Modul Konsumsi tahun 2017, 2018 dan 2019 tersebut menunjukkan pada tahun 2017 konsumsi makanan dan minuman jadi berada pada urutan pertama dan berlanjut sampai tahun 2019, makanan jadi masih di urutan pertama persentasenya meningkat 32,32 persen pada tahun 2017 menjadi 33,81 persen pada tahun 2018 dan menjadi 40,33 pada tahun 2019. Makanan jadi yang banyak dikonsumsi terutama makanan gorengan, roti manis, es dan jajanan anak-

anak lainnya. Disamping alasan kepraktisan karena mudah dan murah ternyata mengkonsumsi makanan jadi merupakan kegiatan untuk melepaskan stress ditengarai dengan maraknya tempat-tempat wisata kuliner dan ramainya pengunjung mall dengan tujuan melepaskan penat sambil berkuliner.

Tabel 3.5.

Pola Konsumsi Penduduk Miskin dan Rata-Rata Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Konsumsi Makanan Tahun 2017-2019 (Dalam Persen)

Kelompok Konsumsi Makanan	Persentase Pola Konsumsi Penduduk Miskin Kota Tangerang (Persen)			Persentase Pola Konsumsi Penduduk Kota Tangerang (Persen)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
A. Padi-Padian	12.3	10.58	8,05	6.74	7.47	6,99
B. Umbi-Umbian	0.98	0.85	0,79	0.79	0.81	0,75
C. Ikan/udang/cumi/kerang	6.92	7.62	7,60	6.55	6.97	7,28
D. Daging	3.61	4.08	4,91	6.1	5.11	5,13
E. Telur Dan Susu	5.47	7.00	6,08	6.25	7.26	6,70
F. Sayur-Sayuran	11.18	8.44	5,94	7.19	6.34	5,53
G. Kacang-Kacangan	2.86	2.34	1,71	1.93	1.68	1,59
H. Buah-Buahan	4.25	4.49	4,87	4.89	5.41	5,30
I. Minyak Dan Kelapa	4.11	2.51	1,92	1.84	1.74	1,76
J. Bahan Minuman	2.88	3.02	2,43	2.38	2.36	2,23
K. Bumbu-Bumbuan	2.3	2.12	1,84	1.56	1.70	1,52
L. Konsumsi Lainnya	2.62	2.10	1,73	2	1.84	1,74
M. Makanan/Minuman Jadi	32.32	33.81	40,33	42.08	41.47	43,47
N. Rokok	8.21	11.04	11,81	9.68	9.84	10,00
Total	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00

Mengunjungi kedai atau kebiasaan membeli makanan jadi juga dilakukan oleh penduduk Kota Tangerang pada umumnya dimana konsumsi makanan jadi menghabiskan 43,47 persen dari seluruh konsumsi makanan. Dari tahun ketahun makanan jadi menghabiskan dana terbanyak dari seluruh konsumsi makanan.

Persentase terbesar ke 2 adalah rokok, Tahun sebelumnya konsumsi rokok hanya sebesar 11,04 persen meningkat menjadi 11,81 persen pada tahun 2019, kenaikan persentase konsumsi ini salah satunya dipicu oleh kenaikan harga komoditas, tetapi walaupun harganya naik tidak juga dialihkan ke konsumsi lain. Konsumsi rokok menggeser padi-padian yang tahun 2019 konsumsinya menurun pada kisaran 8,05 persen sebelumnya pada tahun 2018 konsumsi padi-padian mencapai 10,58 persen, sekarang menempati urutan ke 3 pada konsumsi penduduk miskin. Masih sama dengan tahun sebelumnya konsumsi ini utamanya dihabiskan untuk membeli beras dan sebagian kecil terigu. Urutan ke 4 tidak lagi sayur-sayuran seperti pada tahun 2018, melainkan konsumsi ikan yang menghabiskan 7,60 persen pada tahun 2019 dan 7,62 persen pada tahun 2018, jenis ikan yang paling sering dikonsumsi sebagian besar penduduk miskin adalah ikan teri diawetkan atau ikan asin.

Urutan tertinggi ke lima adalah konsumsi telur dan susu. Untuk memperoleh sumber protein penduduk miskin Kota Tangerang mengkonsumsi jenis protein berupa telur dan susu juga daging terutama daging ayam. Telur dan susu pada tahun 2018 dikonsumsi sebesar 7,00 persen dari total nilai konsumsi sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 6,08 persen dari total konsumsi. Daging ayam menghabiskan 4,91 persen mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,08 persen.

Urutan tertinggi ke 6 adalah sayur-sayuran. Konsumsi sayuran ini sebagian besar untuk membeli bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, jenis sayuran yang sering dikonsumsi penduduk miskin adalah bayam, kangkung, dan sayur kemas seperti sayur asem, sayur lodeh dan sayur sop. Pada tahun 2019 rata-rata penduduk Kota Tangerang mengkonsumsi sayuran hanya sebesar 5,53 persen dari total nilai konsumsi makanan dan sebesar 5,94 untuk konsumsi sayuran warga miskin Kota Tangerang.

Tabel 3.6 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk Kota Tangerang hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011 - 2019. Rata-rata pengeluaran penduduk Kota Tangerang tahun 2015 sebesar Rp 1.354.712 naik menjadi Rp 1.513.892 pada tahun 2016, dan meningkat lagi menjadi 1.652.731 perkapita perbulan pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mencapai Rp 1.804.488 dan terakhir tahun 2019 mencapai Rp 2.015.135 terjadi kenaikan 11,67 persen dari tahun 2018. Komposisi pengeluaran untuk makanan sebesar 44,50 persen jauh lebih kecil jika dibandingkan pengeluaran non makanan sebesar 55,50 persen.

Tabel 3.6.

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011-2019

Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
2011	377.062	438.666	815.728
2012	367.189	383.759	750.948
2013	497.673	636.888	1.134.561
2014	545.683	767.712	1.313.395
2015	588.96	765.752	1.354.712
2016	662.693	851.199	1.513.892
2017	764.837	887.894	1.652.731
2018	836.584	967.904	1.804.488
2019	896.645	1.118.490	2.015.135

3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

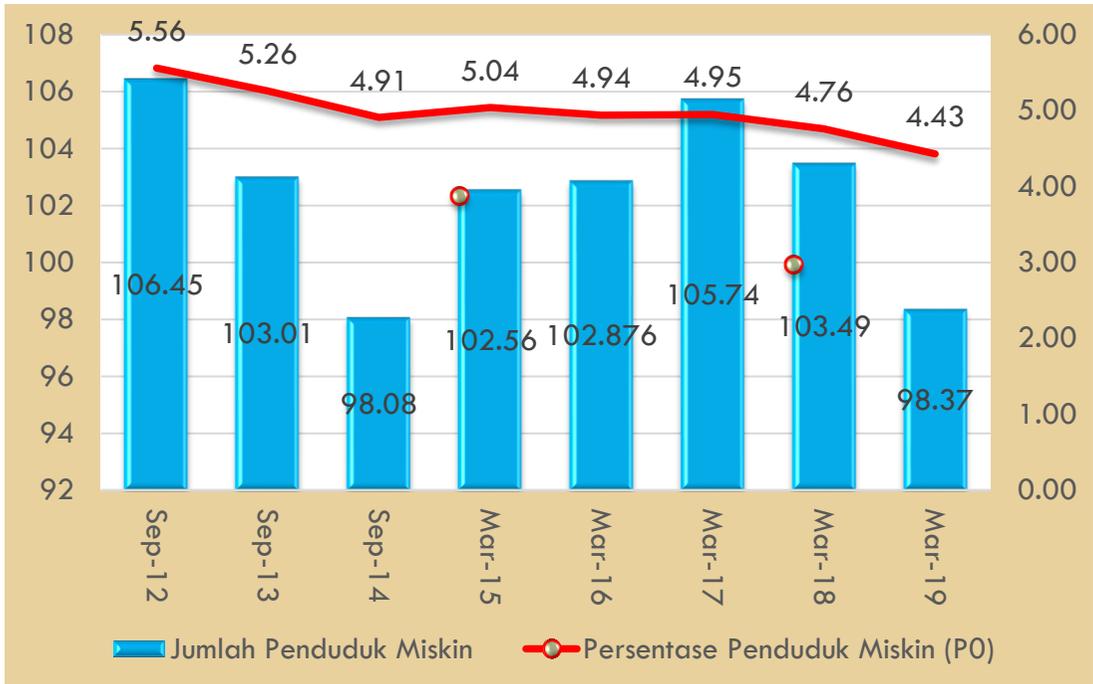
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dengan mengetahui besarnya perkiraan batas garis kemiskinan, selanjutnya dapat dihitung jumlah dan persentase penduduk miskin suatu wilayah. Tabel 3.5 menggambarkan persentase dan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di Provinsi Banten dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin turun menjadi 4.76 persen dibanding tahun 2017 yakni 4,95 persen. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana persentase penduduk miskin mencapai 4,43 persen. Diakui Pemerintah Kota Tangerang telah berhasil menekan laju inflasi sehingga harga-harga barang kebutuhan pokok dapat dikendalikan, Ekonomi tumbuh sangat significant dan penanganan penduduk miskin relatif tepat sasaran.

Tabel 3.7.

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011-2019

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin(000)			Persentase Penduduk Miskin		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	117.31	116,155	114,09	9.74	9.61	9.42
Kab Lebak	111.08	108,815	107,93	8.64	8.41	8.30
Kab Tangerang	191.62	190,054	193,97	5.39	5.18	5.14
Kab Serang	69.11	64,456	61,54	4.64	4.3	4.08
Kota Tangerang	105.34	103,488	98,37	4.95	4.76	4.43
Kota Cilegon	14.89	13,964	13,20	3.52	3.25	3.03
Kota Serang	36.97	36,211	36,21	5.57	5.36	5.28
Tangerang Selatan	28.73	28,212	29,16	1.76	1.68	1.68
Provinsi Banten	675.04	661,355	654,46	5.45	5.24	5.09

Dari tabel 3.7 terlihat bahwa persentase penduduk miskin Kota Tangerang berada pada urutan ke 4 dengan persentase penduduk miskin paling kecil . Urutan pertama Kota Tangsel dengan persentase penduduk miskin sebesar 1,68 persen, Kota Cilegon pada urutan ke 2 dengan persentase sebesar 3,03 persen, Kabupaten Serang pada urutan ke 3 dengan persentase 4,08 persen dan urutan ke 4 Kota Tangerang dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,43 persen. Disusul berturut-turut Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Lebak dan urutan terakhir Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penduduk miskin sebesar 9,61 persen



Grafik 3.1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2012 s/d 2019

Grafik 3.1 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dimana selalu terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sampai tahun 2014 dan dari 2015 sd 2019 berfluktuasi baik jumlah maupun persentasenya.

Naik dan turunnya persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang ini sebagai peringatan bahwa pemerintah harus semakin serius dan fokus dalam pengentasan kemiskinan. Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, biasanya hanya dengan sedikit guncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin terlebih kalau kita cermati lebih jauh tidak sedikit penduduk miskin yang bekerja di sektor informal sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar dari

kemiskinan tetapi ada juga yang masuk menjadi miskin. Sebaiknya program - program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pengentasan kemiskinan akan lebih efektif apabila kemiskinan makro dan mikro disandingkan, intervensi pada kelompok sasaran yaitu kelompok 40 persen terbawah, dengan program- program pengentasan kemiskinan bersumber dari data kemiskinan mikro. Sedangkan evaluasi tentang keberhasilan intervensi dan pembangunan lainnya di potret oleh data Susenas dengan indikator kemiskinan makronya.

Program pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin seperti kesehatan gratis, pendidikan melalui Program Tangerang Cerdas, infrastruktur dan subsidi pangan relatif tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Disamping program yang sifatnya bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin seperti yang telah disampaikan diatas, perlu dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin yaitu memberi peluang kepada masyarakat untuk berdaya secara ekonomi salah satunya dengan meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, memperluas jaringan dan diberikan peluang untuk bisa mengakses modal.

3.3. Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

Mengukur kemiskinan tidak cukup hanya melihat penambahan dan pengurangan jumlah penduduk miskin tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P₁*) adalah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin (GK). Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tabel 3.8 memperlihatkan bahwa indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota Tangerang tahun 2019 yakni 0,64 mengalami penurunan dari tahun 2018. Pada tahun 2017 sebesar 0,7 dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 0,84, artinya rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin di Kota Tangerang dari tahun 2017 ke tahun 2018 semakin menjauh di bawah garis kemiskinan. Namun pada tahun 2019 mulai mengalami penurunan angka indeks yang artinya rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin di Kota Tangerang semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 3.8.

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Banten 2017/2019

No	Kabupaten/Kota	Kedalaman Kemiskinan(P1)			Keparahan Kemiskinan(P2)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Pangeglang	1.25	1.31	1.33	0.25	0.29	0.28
2	Lebak	0.99	1.26	0.97	0.22	0.29	0.21
3	Tangerang	0.68	0.82	0.69	0.13	0.20	0.14
4	Serang	0.79	0.80	0.65	0.19	0.22	0.16
5	Kota Tangerang	0.7	0.84	0.64	0.17	0.24	0.15
6	Kota Cilegon	0.59	0.59	0.34	0.15	0.18	0.07
7	Kota Serang	0.75	0.60	0.51	0.16	0.10	0.11
8	Kota Tangerang Selatan	0.3	0.22	0.27	0.07	0.05	0.07
	Banten	0.86	0.82	0.76	0.17	0.20	0.18

Sedangkan untuk melihat variasi pengeluaran diantara penduduk miskin yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan di antara penduduk miskin dapat dilihat dari **indeks keparahan kemiskinan (P2)** semakin tinggi nilai

indeks semakin tinggi ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin, sebaiknya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu adalah nol atau tidak ada ketimpangan. Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa nilai indeks semakin meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, pada tahun 2018 pengeluaran diantara penduduk miskin bernilai indeks 0.24 dan pada tahun 2019 sebesar 0.15 menggambarkan penyebaran pendapatan sesama penduduk miskin semakin merata. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin begitu pula sebaliknya.

3.4. Gambaran Umum Perekonomian dan Distribusi Pendapatan

Kemiskinan masyarakat di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan perekonomian baik skala makro maupun mikro. Bagi suatu wilayah setingkat kabupaten/kota biasanya perkembangan ekonomi diukur dari naik turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahun. Makin besar pertumbuhan PDRB-nya maka diasumsikan makin baik pula perkembangan ekonominya yang tentunya akan berdampak pada makin sejahteranya masyarakat, dengan catatan bahwa distribusi pendapatan tersebut terbagi merata. Pada kondisi tertentu peningkatan PDRB tidak berkorelasi dengan penurunan atau kenaikan jumlah penduduk miskin. Sebenarnya masalah yang mendasar bukan bagaimana meningkatkan PDRB, tetapi lebih kepada siapa yang menumbuhkan/meningkatkan PDRB, sebagian besar masyarakat atau hanya beberapa gelintir saja. Jika yang berperan menumbuhkan PDRB hanya pengusaha kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan itupun hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja, sehingga kemiskinan maupun ketimpangan semakin parah. Lain halnya jika pertumbuhan itu dihasilkan oleh orang banyak, maka mereka pulalah yang memperoleh manfaat terbesarnya dan buah dari pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih merata.

Ada berbagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain *Kurva Conrad Lorenz*, *Corrado Gini Coefficient*, *Kuznets Index*, *Oshima Index* dan *Theil Decomposition Index*. Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah *Gini Coefficient* atau lebih dikenal dengan nama *Gini Ratio* (GR). Angka *Gini Ratio* menurut H. T. Oshima:

- ketimpangan rendah (*low*) bila GR kurang dari 0,3;
- ketimpangan sedang (*moderate*) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4 dan
- Ketimpangan tinggi (*high*) bila GR lebih dari 0,4.

Angka *Gini Ratio* menurut Michael P. Todaro:

- Distribusi pendapatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2 sampai 0,35
- Relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan kurang dari 0,5
- Timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7

Tabel 3.9 memperlihatkan angka Gini Rasio di Provinsi Banten, secara umum Gini Rasio Propinsi Banten tahun 2019 ini mengalami penurunan kecuali Kabupaten Serang yang mengalami kenaikan, Kota Tangerang termasuk kab/kot yang GR nya menurun ini menunjukkan pendapatan penduduk semakin merata. Ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin menurun. Angka Gini Rasio Kota Tangerang sebesar 0.328 menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 0.33 sehingga menurut Michael P. Todaro ketimpangannya bergeser dari ketimpangan sedang ke ketimpangan rendah, beberapa tahun terakhir Gini Rasio Kota Tangerang bergerak turun atau menggambarkan ketimpangan pendapatan berhasil di hambat.

Tabel 3.9.
Gini Rasio Kab/Kota se Provinsi Banten Tahun 2017/2019

No	Kabupaten/Kota	Gini Rasio		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pangeglang	0,279	0,319	0,31
2	Lebak	0,268	0,303	0,297
3	Tangerang	0,329	0,342	0,325
4	Serang	0,285	0,284	0,305
5	Kota Tangerang	0,343	0,33	0,328
6	Kota Cilegon	0,341	0,352	0,315
7	Kota Serang	0,358	0,351	0,342
8	Kota Tangerang Selatan	0,361	0,379	0,331
	Banten	0,382	0,385	0,365

Dari tabel 3.9 terlihat bahwa pada tahun 2019 Gini Rasio seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berada pada ketimpangan rendah. Kabupaten Lebak dengan Gini Rasio 0,297 merupakan kabupaten dengan ketimpangan pendapatan paling rendah sementara Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan dengan Gini Rasio 0,342 dan 0,331 merupakan Kota dengan ketimpangan paling tinggi di Wilayah Banten.

Pola distribusi pendapatan yang didasarkan pada hasil penghitungan Gini Ratio barulah menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara garis besar. Apakah merata miskin atau merata menengah? Berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok penduduk berpendapatan rendah/miskin? Gini Ratio tidak dapat

menjawab kedua pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, Gini Ratio perlu disandingkan dengan indikator lain yang telah dikembangkan oleh Bank Dunia dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (inequality) melalui indikator yang disebut relative inequality. Relative inequality diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai kelas atau kelompok masyarakat. Relative inequality dan absolute poverty merupakan dua aspek kembar keadilan dalam proses pemerataan pembangunan atau pemerataan pendapatan nasional/daerah. Ketidakmerataan pendapatan.

Menurut kriteria *relative inequality* berdasarkan kriteria Montek S. Ahluwalia atau Bank Dunia adalah sebagai berikut :

- Ketimpangan dianggap parah apabila 40 persen penduduk berpenghasilan rendah menikmati kurang dari 12 persen Produk domestik.
- Ketidakmerataan dianggap moderat apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati 12-17 persen Produk domestik.
- dan apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17 persen produk domestik maka ketimpangan atau kesenjangan dinyatakan lunak .

Dari tabel 3.9 terlihat bahwa pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan antara kelompok 40 persen terbawah dengan pendapatan sebesar 13,72 persen dan 40 persen menengah dengan pendapatan 33,41 Persen dari total Produk Domestik, sedangkan 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi menikmati 52,87 persen dari total Produk Domestik Kota Tangerang. Menurut Bank Dunia tahun 2016 menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan termasuk pada ketimpangan pendapatan yang moderat.

Kondisi tahun 2017 berubah ketimpangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin semakin melunak dimana kelompok 40 persen terendah

pendapatannya naik menjadi 18.87 persen dari total pendapatan Kota Tangerang, kelompok 40 persen menengah penghasilannya juga naik menjadi 39.74 persen sedangkan 20 persen kelompok teratas penghasilannya menurun menjadi 41.38 persen dari total Produk domestik. Pada tahun 2017 ini ketimpangan pendapatan berubah menjadi ketimpangan pendapatan yang tahun sebelumnya moderat berubah menjadi lunak karena 40 persen pendapatan penduduk berpendapatan rendah sudah diatas 17 persen dari produk domestik.

BAB IV

Pemanfaatan Data Kemiskinan Mikro di Kota Tangerang

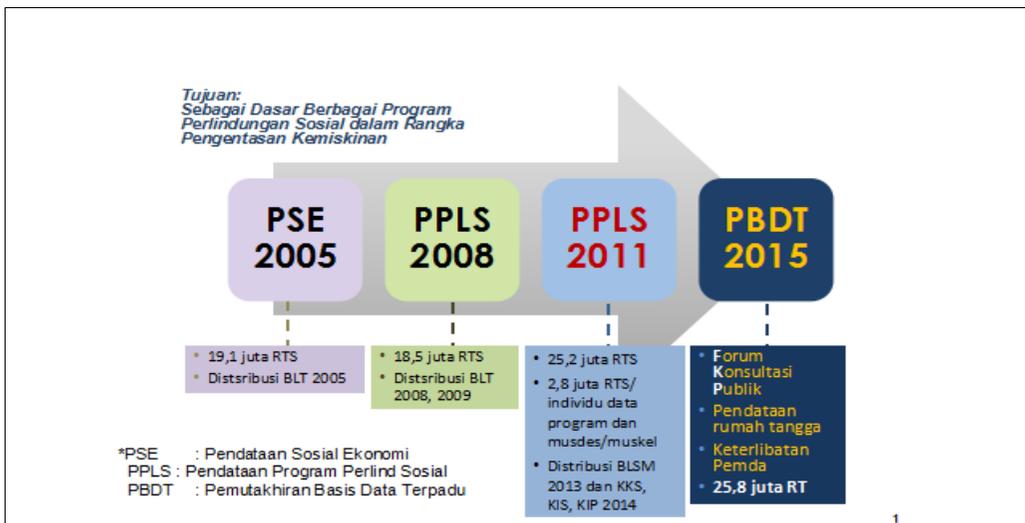
4.1. Membandingkan Tujuan dan Keterkaitan Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif

Kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang bersifat absolut bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan dengan suatu standar tertentu tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat secara umum. Sedangkan kemiskinan dapat juga dipandang sebagai suatu kondisi yang bersifat relatif bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan dengan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Jika menggunakan standar absolut, standar kemiskinan konsumsi (garis kemiskinan) dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup layak dan kebutuhan non-makanan tertentu tanpa memperhitungkan tingkat konsumsi seluruh penduduk. Di Indonesia, angka kemiskinan absolut dihitung menggunakan garis kemiskinan (GK). GK adalah ukuran atau indikator kesejahteraan yang menunjukkan kemampuan daya beli yang sama dari tahun ke tahun. Sebagai contoh antara 2018 dan 2019 Kota Tangerang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 4.76% menjadi 4.43%, atau dari 103.488 jiwa turun menjadi 98.370 jiwa. Di sinilah peran utama penggunaan pendekatan penghitungan kemiskinan yang setiap tahun dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Standar ini tidak akan berubah walaupun tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Dengan demikian, kemiskinan absolut ini paling sesuai untuk digunakan dalam pemantauan program penanggulangan kemiskinan antar waktu.

Jika menggunakan standar relatif, standar kemiskinan akan dihitung berdasarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara umum. Tentunya standar ini akan berubah

antar-waktu dan antar-tempat. Kemiskinan relatif ini sangat relevan khususnya apabila Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan program penanggulangan kemiskinan hanya difokuskan pada segmen termiskin tertentu, misalnya pada 10% termiskin atau 20% termiskin dari populasi. Pada saat inilah pendekatan kemiskinan relatif lebih tepat untuk digunakan. Berbeda tujuan dengan kemiskinan absolut yang digunakan untuk evaluasi naik-turunnya tingkat kemiskinan, pendekatan kemiskinan relatif ditujukan sebagai dasar perhitungan atau pertimbangan dalam mendesain program yang ditargetkan untuk membantu masyarakat miskin. Pada taraf yang lebih luas tujuan segmentasi kemiskinan dalam pendekatan relatif adalah untuk menyediakan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi distribusi kemiskinan saat ini agar dapat digunakan oleh program penargetan kemiskinan dalam menyusun strategi dan jumlah target yang sesuai antara anggaran dan kebutuhan tiap tingkatan masyarakat atau dapat juga dimanfaatkan untuk menyusun strategi pembangunan pada setiap level pemerintahan, dari pusat hingga daerah.



Gambar 4.1 Gambar Sejarah Sumber Data Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 di Indonesia

Berawal dari Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005 Badan Pusat Statistik mengupdate data tersebut menjadi data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) tahun 2008 dan 2011. Empat tahun kemudian, pada tahun 2015 diupdate menjadi Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT). Data yang dikumpulkan dalam PBDT adalah data 40% terbawah/termiskin dari seluruh populasi penduduk Indonesia, yang mengandung informasi lengkap nama dan alamat rumah tangga sasaran (RTS) untuk Program Perlindungan Sosial. Rincian data yang dikumpulkan dalam PBDT 2015 dapat juga disebut sebagai data kemiskinan **mikro**. Untuk selanjutnya data PBDT tersebut setiap tahun di update oleh Kementerian Sosial untuk menangani program pengentasan kemiskinan yang berasal dari dana pusat antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan KIS, Program Indonesia Pintar dan lain - lain. Penjelasan dibawah ini menggambarkan perbedaan antara kemiskinan makro dan mikro.

Tabel 4.1.1
Perbandingan Kemiskinan Mikro (Relatif) dan Kemiskinan Makro (Absolut)

KEMISKINAN MIKRO (tahun 2005, 2008, 2011, 2015)	KEMISKINAN MAKRO (sejak tahun 1976)
1. Metodologi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep: Multi Dimensi ▪ Pendekatan Non-Moneter ▪ Didasarkan pada Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT miskin 	1. Metodologi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep: <i>Basic Needs Approach</i> ▪ Pendekatan: Moneter ▪ Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per kapita perhari) + Non Makanan
2. Sumber data: PSE05, PPLS08, PPLS2011, PBDT2015	2. Sumber data: Susenas (sampel) <i>Sejak 2011: Maret dan September</i>
3. Data menunjukkan jumlah RT Sasaran (sangat miskin + miskin + hampir/ rentan miskin) - <i>by name by address</i>	3. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan <u>ESTIMASI</u>
4. Pemanfaatan: Berguna untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dsb)	4. Pemanfaatan: Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis, tapi tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin.

Untuk mempermudah pengguna memahami data dan menentukan sasaran program, dikembangkanlah kategorisasi dalam mengklasifikasikan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu:

- 1) **Sangat Miskin**, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di bawah 0,8xGaris Kemiskinan (GK)
- 2) **Miskin**, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (GK)
- 3) **Hampir Miskin**, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di bawah garis 1,2x Garis Kemiskinan (GK)
- 4) **Rentan Miskin**, adalah mereka yang konsumsi perkapita per bulan berada dibawah 1.41 GK.

Masyarakat pada umumnya dan juga pengambil kebijakan di berbagai tingkat pada khususnya sudah sangat familiar dengan kategorisasi ini.

4.2. Pemanfaatan Data Pendidikan untuk Pengentasan Kemiskinan

Hasil update Basis Data Terpadu PBDT 2015 oleh Kemensos pada tahun 2018 untuk program pengentasan kemiskinan menghasilkan basis data yang siap dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan di daerah utamanya adalah program yang berkaitan dengan pendidikan karena didalamnya memuat data individu *by name by address*, namun demikian kami belum memperoleh perangkingan sehingga tidak bisa dimunculkan mana rumah tanga yang sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Dari data tersebut kami tampilkan keseluruhan atau dari basis data tersebut yang merupakan 40 persen terendah yang kami sebut sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Tabel 4.2.1 kami tampilkan penduduk RTS usia sekolah 7 sd 18 tahun yang terbagi menjadi penduduk yang belum pernah sekolah, masih sekolah dan tidak bersekolah lagi menurut kecamatan namun demikian agar permasalahan pendidikan ini bisa dilihat sampai wilayah terkecil kami sampaikan juga kondisi di setiap kelurahan pada Tabel 4.2.2 sd 4.2.14. Selanjutnya untuk melihat penduduk yang belum pernah sekolah tersebut masuk usia pada jenjang SD, SLTP atau SLTA bisa dilihat pada tabel 4.2.15.

Tabel 4.2.1.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
Ciledug	0	12	1	13
Larangan	2	8	2	12
Karang Tengah	0	6	2	8
Cipondoh	1	18	4	23
Pinang	7	23	4	34
Tangerang	0	8	1	9
Karawaci	1	22	4	27
Jatiuwung	3	14	1	18
Cibodas	3	44	6	53
Periuk	1	9	1	11
Batucapeper	2	11	2	15
Neglasari	12	35	6	53
Benda	6	11	2	19
Total	38	221	36	295

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.2.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Ciledug Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Tajur	0	4	0	4
2	(002)Parung serab	0	0	0	0
3	(003)Paniggilan	0	0	0	0
4	(012)Panninggilan Utara	0	0	0	0
5	(013)Sudimara Selatan	0	3	0	3
6	(014)Sudimara Barat	0	1	0	1
7	(015)Sudimara Jaya	0	1	0	1
8	(016)Sudimara Timur	0	3	1	4
	Total	0	12	1	13

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.3.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Larangan Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Larangan Selatan	0	1	1	2
2	(002)Gaga	0	0	0	0
3	(003)Cipadu Jaya	0	0	0	0
4	(004)Koreo Selatan	2	1	0	3
5	(005)Cipadu	0	0	1	1
6	(006)Koreo	0	0	0	0
7	(007)Larangan Indah	0	5	0	5
8	(008)Larangan Utara	0	1	0	1
	Total	2	8	2	12

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.4.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Karang Tengah Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Pendurenan	0	1	0	1
2	(002)Pondok Pucung	0	1	0	1
3	(003)Karang Tengah	0	0	0	0
4	(004)Karang Timur	0	2	1	3
5	(005)Karang Mulya	0	1	0	1
6	(006)Parung Jaya	0	0	0	0
7	(007)Pondok Bahar	0	1	1	2
	Total	0	6	2	8

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.5.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Cipondoh Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(012)Poris Plawad Indah	0	1	2	3
2	(013)Cipondoh	1	1	1	3
3	(014)Kenanga	0	1	0	1
4	(015)Gondrong	0	1	0	1
5	(016)Petir	0	5	0	5
6	(017)Ketapang	0	1	0	1
7	(018)Cipondoh Indah	0	1	0	1
8	(019)Cipondoh Makmur	0	0	0	0
9	(020)Poris Plawad Utara	0	3	1	4
10	(021)Poris Plawad	0	4	0	4
	Total	1	18	4	23

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.6.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Pinang Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Panunggangan Utara	0	1	1	2
2	(002)Panunggangan	0	2	0	2
3	(003)Panunggangan Timur	0	1	0	1
4	(004)Kunciran	0	2	1	3
5	(005)Kunciran Indah	2	7	0	9
6	(006)Sudimara Pinang	0	2	0	2
7	(007)Pinang	0	3	0	3
8	(008)Neroktog	2	1	1	4
9	(009)Kunciran Jaya	2	0	0	2
10	(010)Pakojan	0	4	0	4
11	(011)Cipete	1	0	1	2
	Total	7	23	4	34

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.7.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Tangerang Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(004)Cikokol	0	3	0	3
2	(005)Kelapa Indah	0	0	0	0
3	(006)Babakan	0	2	0	2
4	(014)Sukasari	0	0	0	0
5	(015)Buaran Indah	0	2	0	2
6	(016)Tanah Tinggi	0	1	1	2
7	(017)Sukaasih	0	0	0	0
8	(018)Sukarasa	0	0	0	0

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.8.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Karawaci Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Karawaci Baru	0	2	0	2
2	(002)Nusa Jaya	0	1	0	1
3	(003)Bojong Jaya	0	0	0	0
4	(004)Karawaci	0	1	0	1
5	(005)Cimone Jaya	0	1	1	2
6	(006)Cimone	0	1	0	1
7	(007)Bugel	0	2	1	3
8	(008)Margasari	0	6	0	6
9	(009)Pabuaran	0	2	1	3
10	(010)Sukajadi	0	2	0	2
11	(011)Gerendeng	0	1	0	1
12	(012)Koang Jaya	1	0	0	1
13	(013)Pasar Baru	0	0	0	0
14	(014)Sumur Pacing	0	1	1	2
15	(015)Pabuaran Tumpeng	0	1	0	1
16	(016)Nambo Jaya	0	1	0	1
Total		1	22	4	27

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.9.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Jatiuwung Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Manis Jaya	0	1	0	1
2	(002)Jatake	0	3	0	3
3	(003)Gandasari	0	5	1	6
4	(010)Kroncong	0	0	0	0
5	(011)Alam Jaya	2	0	0	2
6	(012)Pasir Jaya	1	5	0	6
		3	14	1	18

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.10.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Cibodas Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Panunggangan Barat	1	12	0	13
2	(002)Cibodasari	0	1	0	1
3	(003)Cibodas Baru	0	2	0	2
4	(004)Cibodas	1	7	1	9
5	(005)Uwung Jaya	0	6	0	6
6	(006)Jatiuwung	1	16	5	22
		3	44	6	53

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.11.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Periuk Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Gembor	0	3	0	3
2	(002)Gebang Raya	1	2	0	3
3	(003)Sangiang Jaya	0	2	0	2
4	(004)Periuk	0	0	0	0
5	(005)Periuk Jaya	0	2	1	3
		1	9	1	11

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.12.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Batu Ceper Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Porisgaga Baru	0	1	0	1
2	(002)Poris Jaya	0	0	0	0
3	(003)Porisgaga	2	3	0	5
4	(004)Kebon Besar	0	6	0	6
5	(005)Batuceper	0	0	1	1
6	(006)Batujaya	0	0	1	1
7	(007)Batusari	0	1	0	1
		2	11	2	15

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.13.**Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Neglasari Tahun 2019**

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Karang Anyar	4	5	1	10
2	(002)Karang Sari	1	1	0	2
3	(003)Neglasari	0	5	0	5
4	(004)Mekarsari	1	8	2	11
5	(005)Kedaung Baru	3	5	0	8
6	(006)Kedaung Wetan	2	6	0	8
7	(007)Selapajang Jaya	1	5	3	9
		12	35	6	53

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.14.

Penduduk RTS Umur 7 s/d 18 Tahun di Kota Tangerang Menurut Partisipasi Sekolah dan Menurut Kecamatan Benda Tahun 2019

No	Kelurahan	Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total
1	(001)Belendung	0	3	1	4
2	(002)Jurumudi Baru	0	3	0	3
3	(003)Jurumudi	5	1	0	6
4	(004)Pajang	0	3	0	3
5	(005)Benda	1	1	1	3
		6	11	2	19

Sumber: Kemensos 2019

Tabel 4.2.15.

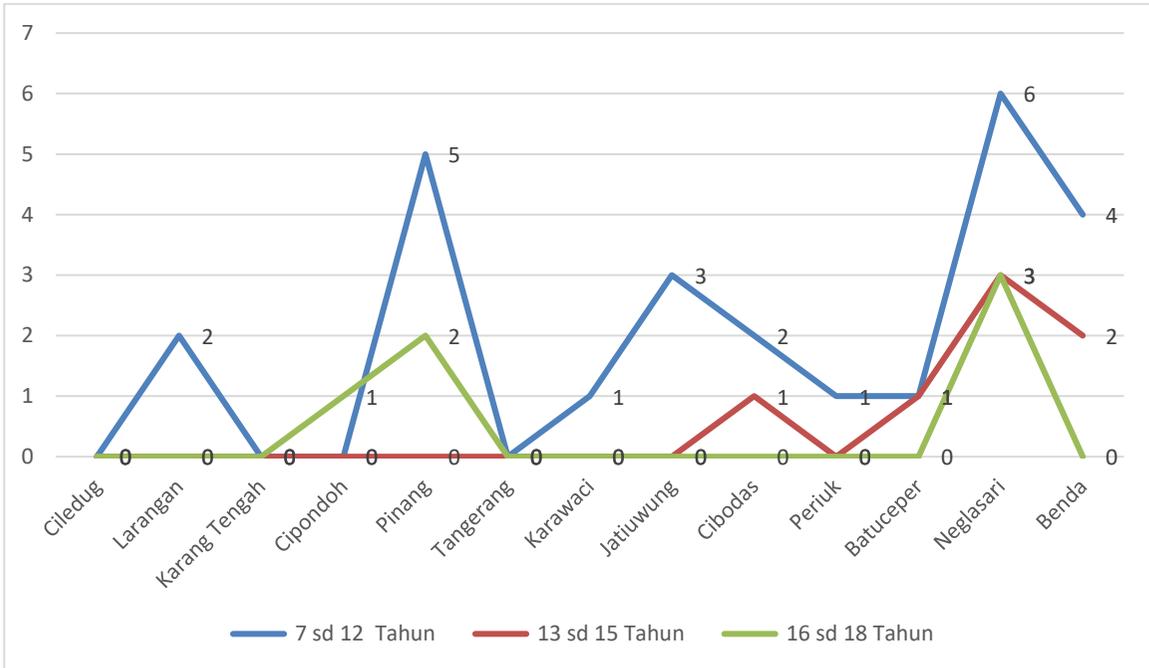
Penduduk RTS Umur 7 s/d 12, 13 s/d 15 dan 16 s/d 18 Tahun Yang Belum Pernah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2019

Kecamatan	7 sd 12 Tahun	13 sd 15 Tahun	16 sd 18 Tahun	Total
Ciledug	0	0	0	0
Larangan	2	0	0	2
Karang Tengah	0	0	0	0
Cipondoh	0	0	1	1
Pinang	5	0	2	7
Tangerang	0	0	0	0
Karawaci	1	0	0	1
Jatiuwung	3	0	0	3
Cibodas	2	1	0	3
Periuk	1	0	0	1
Batuceper	1	1	0	2
Neglasari	6	3	3	12
Benda	4	2	0	6
Total	25	7	6	38

Sumber: Kemensos 2019

Grafik 4.1.

Jumlah Penduduk RTS umur 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun yang Belum Pernah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2019



Grafik 4.1 memperlihatkan penduduk RTS usia sekolah yang belum pernah sekolah dibedakan menurut usia sekolah agar pengambil kebijakan fokus dalam mengintervensi RTS tersebut. Untuk usia SD akan lebih baik jika ditangani dengan memasukkan ke sekolah formal sebaliknya yang usia SMP akan lebih baik jika disiapkan untuk sekolah non formal.

Dari grafik tampak Kecamatan Neglasari banyak anak seusia SD yang belum pernah sekolah disusul Kecamatan Pinang sedangkan untuk anak seusia SLTP dan SLTA Kecamatan Neglasari juga masih mendominasi dengan banyaknya penduduk RTS yang belum pernah sekolah. Untuk rincian tiap kelurahan bisa dilihat di tabel masing-masing kecamatan.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Peningkatan dan penurunan penduduk miskin lebih dikarenakan banyaknya penduduk yang hidup disekitar garis kemiskinan atau penduduk yang hampir miskin atau rentan miskin sehingga mereka akan mudah sekali berubah menjadi miskin hanya karena sedikit goncangan ekonomi atau kenaikan harga pangan. Konsumsi makanan biasanya menyumbang prosentase yang cukup tinggi pada Garis Kemiskinan. Seperti diketahui Garis Kemiskinan Kota Tangerang pada tahun 2019 sebesar Rp584.318, Konsumsi makanan menyumbang 44,50 persen atau Rp.896.645,- sedangkan konsumsi non makanan menghabiskan 55,50 persen atau sekitar Rp 1.118.490,-

Konsumsi rokok yang masuk kelompok makanan dengan kalori nol menyumbang andil yang cukup tinggi dalam pengeluaran makanan, penduduk miskin menghabiskan 11,81 persen konsumsi makanan untuk membeli rokok. Kenaikan harga rokok tidak membuat mereka mengalihkan ke konsumsi lain.

Konsumsi beras menyumbang andil yang cukup tinggi terhadap pengeluaran penduduk miskin. Kelompok padi – padian secara rata-rata menyumbang sekitar 8,05 persen dan hampir seluruhnya untuk membeli beras hanya sebagian kecil saja dikeluarkan untuk terigu, sehingga kenaikan harga pada komoditi ini akan signifikan menaikkan garis kemiskinan, akibatnya penduduk dengan pengeluaran sama semula tidak miskin berubah menjadi miskin. Oleh karenanya stabilitas harga dan ketersediaan beras perlu di jaga agar penduduk yang masuk kategori miskin tidak

semakin terbebani dan penduduk yang berada sedikit diatas garis kemiskinan tidan jatuh menjadi penduduk miskin.

Selain beras pengeluaran penduduk miskin pada kelompok makanan dan minuman jadi pada tahun 2019 ini menghabiskan sebesar 40,33 persen dari total pengeluaran makanan, naik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 hanya sebesar 33,81 persen. Jajan buat anak-anak seperti sesuatu yang wajib bagi mereka, kadang-kadang tidak dilihat dari sisi kesehatan, jajanan yang banyak mengandung pengawet, pemanis buatan merupakan jajanan anak-anak yang harganya cukup murah sehingga banyak disasar oleh anak-anak dari rumah tangga miskin. Makanan lain yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga miskin adalah gorengan, pengeluaran untuk air galon isi ulang juga tergolong tinggi pada kelompok ini. Dengan mengubah kebiasaan dan pendidikan perilaku hidup sehat sebenarnya pengeluaran ini dapat dialihkan.

Kelompok sayur-sayuran seperti bayam dan kangkung serta sayur kemas seperti sop dan sayur asem menghabiskan 5,94 persen dari seluruh konsumsi makanan, jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 8,44 persen. Selanjutnya ikan menghabiskan 7,60 persen, telur dan susu menghabiskan 6,08 persen dan daging ayam ras menghabiskan 4,91 persen. Komoditas tersebut termasuk komoditas yang perlu terus dijaga ketersediaannya dan dikendalikan karena sering dikonsumsi penduduk miskin.

Perkembangan tingkat kemiskinan (jumlah dan persentase penduduk miskin) pada periode 2013 sd 2019 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun. Menurun dari 2013 ke 2014 tetapi meningkat lagi pada tahun 2015. Peningkatan ini terjadi hampir sebagian besar di Kabupaten/ Kota diseluruh wilayah Indonesia sehingga persentase penduduk miskin di Indonesia juga tercatat meningkat pada tahun 2015. Setelah secara persentase menurun di tahun 2016 meningkat lagi di tahun 2017 dan menurun

cukup signifikan di tahun 2018 dan menurun kembali di tahun 2019 sehingga persentase penduduk miskinnya di capai 4,43 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) merupakan indikator untuk melihat seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dibawah garis kemiskinan atau banyak rumah tangga yang berada pada kondisi kronis. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan indeksnya semakin meningkat artinya pengeluaran penduduk miskin sangat bervariasi dari yang sangat rendah ke yang sangat tinggi yaitu mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar.

Secara makro kondisi ekonomi Kota Tangerang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dimana Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang mencatat pertumbuhan sebesar 4,31 persen tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin tidaklah berkorelasi secara kuat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis akan menurunkan jumlah penduduk miskin, masih ada faktor lain yang cukup berpengaruh yaitu distribusi pendapatan atau pemerataan pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio.

Bank Dunia berdasarkan telah yang dilakukan terhadap berbagai negara menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penanggulangan kemiskinan bukanlah tujuan yang saling bertentangan. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan (Todaro dan Smith, 2006), yaitu:

- Kemiskinan yang meluas akan menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mampu membiayai pendidikan anaknya (investasi fisik), tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman kredit (investasi moneter) dan dengan

ketiadaan peluang investasi fisik maupun moneter maka mereka biasanya mempunyai banyak anak sebagai sumber keamanan keuangan di masa tua nanti. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama pertumbuhan perkapita lebih kecil daripada jika distribusi pendapatan lebih merata.

- Pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami oleh golongan miskin yang tercermin dari kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan akibatnya secara langsung menyebabkan perekonomian tumbuh lambat. Strategi yang diujukan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup golongan miskin tidak saja akan memperbaiki kesejahteraan mereka, tetapi juga akan meningkatkan produktivitas dan pendaatan seluruh perekonomian.
- Peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal, seperti makanan dan pakaian secara menyeluruh, sehingga dengan meningkatnya permintaan terhadap barang lokal akan memberi rangsangan yang lebih besar kepada produksi lokal, memperbesar kesempatan kerja lokal dan menumbuhkan investasi lokal. Sementara golongan menengah dan kaya lebih senang membelanjakan sebagian besar uangnya untuk barang-barang mewah impor.
- Penurunan kemiskinan secara masal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat karena merupakan insentif materi dan psikologis yang kuat bagi meluasnya partisipasi publik dalam proses pembangunan (peningkatan investasi dan SDM).

Berdasarkan beberapa bahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penanggulangan kemiskinan bukanlah tujuan yang saling bertentangan. Namun apapun sebabnya, yang jelas, pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan merupakan dua tujuan yang bisa dicapai secara bersamaan,

Yang Paling berpengaruh pada penentuan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan, sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga (inflasi) dan pola konsumsi, menekan kenaikan harga merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan.

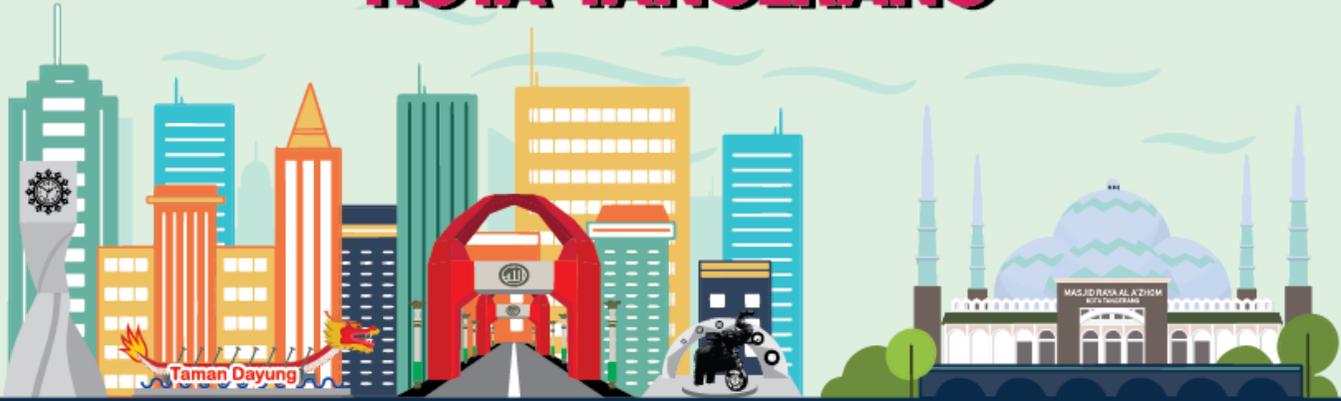
Keterkaitan antara data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro adalah dua data yang perlu disandingkan, jika dimanfaatkan secara beriringan membuat program pengentasan kemiskinan jadi semakin terarah, kemiskinan makro untuk mengevaluasi kemiskinan di suatu wilayah antar waktu, sedangkan data kemiskinan mikro adalah menyajikan data Rumah Tangga Sasaran untuk intervensi program sehingga lebih efisien dalam pengentasan kemiskinan. Data Rumah Tangga Sasaran hasil PBDT 2015 yang kemudian diupdate oleh dinas instansi terkait dalam hal ini adalah Kemensos merupakan data Rumah Tangga Sasaran paling mutakhir dapat dilakukan intervensi langsung pada rumah tangga sasaran karena data yang dicakup cukup lengkap tersedia data sampai 40 persen terendah , didalamnya memuat data yang sangat lengkap baik data pendidikan, pekerjaan, perumahan, usaha mikro kecil, penyakit kronis sampai pada administrasi kependudukan.

Upaya memberdayakan dan meningkatkan pendapatan merupakan salah satu cara untuk mengentaskan mereka dari jerat kemiskinan . Bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) beasiswa bagi yang masih sekolah dan jaminan kesehatan adalah bantuan yang dinilai tepat tetapi yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan dan bimbingan yang akhirnya akan membuat mereka untuk mandiri. Pembinaan yang diperlukan seperti pembinaan pada usaha kecil mikro pelatihan kerja dan penambahan ketrampilan bagi warga miskin yang selalu berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang rendah dan minim ketrampilan.

Komitmen dan upaya pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin sangat kuat terbukti dengan banyaknya program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah dengan tujuan mengangkat yang miskin menjadi tidak

miskin. Semoga keberhasilan Pemerintah Daerah di tahun 2019 yang berhasil menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin dapat terus dipertahankan dan terus konsisten mengupayakan pengurangan jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang.

INDEKS KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA TANGERANG



JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000) & JUMLAH PENDUDUK MISKIN (%)

Perkembangan jumlah dan persentasenya penduduk miskin dari tahun 2016-2019 terus mengalami penurunan, di karenakan Pemerintah Kota Tangerang semakin serius menekan angka kemiskinan di Kota Tangerang

○ JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000) ○ JUMLAH PENDUDUK MISKIN (%)

○ INDEX KEDALAMAN KEMISKINAN
○ INDEX KEPARAHAN KEMISKINAN



GARIS KEMISKINAN KOTA TANGERANG





"The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other".

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

sumber : World Bank



DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA TANGERANG

JL. Satria Sudirman No. 1, Suka Asih, Kota Tangerang, 15123

Telp. 021-55764955, Fax. 021-5569457

Website : Tangerangkota.go.id Email: diskominfo@tangerang.go.id

